

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM**



TRIWULAN I TAHUN 2024



**BALAI PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NUSA TENGGARA BARAT
BALAI BESAR PENERAPAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan Monev Pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian NTB Triwulan I ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan monev ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I, yaitu periode bulan Januari sampai dengan Maret 2024.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menyampaikan informasi dan pendokumentasian kegiatan Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian NTB selama 3 (tiga) bulan yang akan digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi untuk masa mendatang. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian laporan ini masih jauh dari ksempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan kualitas laporan yang akan datang.

Tidak lupa pula kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan ini, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mataram, Maret 2024

Kepala Balai,




Dr. Ir. Awaludin Hipi, M.Si
NIP. 19671114 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
1.4. Dasar Hukum.....	5
BAB II PELAKSANAAN	7
2.1. Manajemen Perubahan	7
2.2. Penataan Tatalaksana.....	7
2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM.....	7
2.4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	8
2.5. Penguatan Pengawasan	8
2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	9
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	10
3.1. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan	10
3.2. Permasalahan	14
3.3. Saran dan Perbaikan	15
3.4. Tindak Lanjut Hasil Monev	15
BAB IV PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kementerian pertanian sebagai salah satu lembaga negara yang melaksanakan tugas pada sektor pelayanan kepada masyarakat memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan tugas pokok secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas dan fungsi yang di jalankan berkaitan erat dengan pelaksanaan unsur Good Governance. Salah satu unsur dalam pelaksanaan dan implemntasi Good Governance yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dan penigkatan dalam pelayanan publik. Pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, efektif dan efisien. Baik artinya mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan lain. Efektif artinya mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara yang benar dan tepat. Efisien artinya mampu menyelesaikan permasalahan dengan sumber daya yang minimal. Tujuan dilakukannya penataan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat secara cepat dan tepat serta professional. Namun, penyalahgunaan wewenang, praktik KKN dan lemahnya dalam segi pengawasan merupakan kendala cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima, tentunya instansi pemerintah perlu berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Beberapa langkah yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan pembangunan Zona Integritas yaitu: 1). menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi reformasi Birokrasi, 2). penyederhanaan pada indikator proses maupun indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu, perlu dilakukan

penyusunan pedoman pembangunan Zona Integritas dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

- ❖ Maksud penyusunan laporan ini adalah sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- ❖ Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah:
 1. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkup BPSIP NTB.
 2. Sebagai bahan umpan balik dan evaluasi dalam pengelolaan pelayanan dan kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat menyempurnakan sistem yang telah berjalan.

1.3. Ruang Lingkup

Untuk mempercepat tercapainya program Reformasi Birokrasi secara efektif dan terarah, maka perlu diprogramkan secara kongkret strategi untuk pencapaian target reformasi birokrasi melalui implementasi program pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK?WBBM) yang meliputi:

1. Penerapan program manajemen perubahan
2. Penataan tata laksana
3. Penataan manajemen SDM
4. Penguatan pengawasan
5. Penguatan akuntabilitas kinerja
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

1.4. Dasar Hukum

- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

- ❖ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi republic Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- ❖ Peraturan Menteri Pertanian No. 24 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1. Manajemen Perubahan

Indikator :

1. Penyusunan Tim Kerja
2. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM
4. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja

Target :

1. Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) di BPSIP NTB menuju WBK/WBBM
2. Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di BPSIP NTB menuju WBK/WBBM
3. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) di BPSIP NTB
4. Meningkatnya komitmen, pola fikir dan budaya kerja aparatur di BPSIP NTB

2.2. Penataan Tatalaksana

Indikator :

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama
2. E-office
3. Keterbukaan Informasi Publik

Target :

1. Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di BPSIP NTB
2. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen dan meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM
3. Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari BPSIP NTB

2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator :

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
2. Pola mutasi internal
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

4. Penetapan Kinerja Individu
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
6. Sistem informasi kepegawaian

Target :

1. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur BPSIP NTB
2. Meningkatnya profesionalitas manajemen SDM aparatur BPSIP NTB
3. Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur BPSIP NTB
4. Meningkatnya disiplin SDM pada aparatur BPSIP NTB
5. Meningkatnya transparansi dan keakuratan data pada aparatur BPSIP NTB

2.4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

1. Keterlibatan pimpinan
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Target :

1. Terwujudnya efektivitas pimpinan dalam penyusunan perencanaan
2. Terwujudnya penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu

2.5. Penguatan Pengawasan

Indikator :

1. Pengendalian Gratifikasi
2. Penerapan SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah)
3. Pengaduan masyarakat
4. Wistle Blowing System (WBS)
5. Penanganan Benturan Kepentingan

Target :

1. Meminimalisir adanya indikasi suap di dalam ruang kerja aparatur BPSIP NTB
2. Terwujudnya peningkatan kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada BPSIP NTB
4. Meningkatnya kualitas dan efektivitas terhadap pelaksanaan penyelesaian tugas aparatur di BPSIP NTB
5. Meningkatnya efektivitas tugas dan fungsi aparatur di BPSIP NTB

2.6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

1. Standar pelayanan
2. Budaya pelayanan prima
3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Target :

1. Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan yang terintegrasi di BPSIP NTB
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di BPSIP NTB
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik

BAB III
ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan evaluasi dari hasil pelaksanaan kegiatan Triwulan I dilakukan pada bulan Maret. BPSIP sebagai unit kerja di bawah BSIP, pada tahun 2024 memperoleh anggaran dalam dipa sebesar Rp. 14,643,232,000,-. Dari anggaran tersebut, BSIP melaksanakan kegiatan teknis yaitu (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan (2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Kegiatan Manajemen. Pada Triwulan I ini, terdapat beberapa kegiatan yang masih terblokir sehingga menyebabkan realisasi anggaran belum bisa maksimal. Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian NTB sebagai instansi pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima dan bebas dari korupsi.

Daftar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, bulan Januari - Maret 2024.

No.	Program/ Area Pengungkit	Indikator	Target	Kegiatan
1.	Manajemen Peubahan	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas di BPSIP NTB menuju WBK/WBBM	1. Menentukan ASN BPSIP menjadi Tim Kerja 2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BPSIP NTB
		Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di BPSIP NTB menuju WBK/WBBM	1. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2. Menetapkan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dalam bentuk Surat Keputusan Kepala BPSIP NTB
		Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di BPSIP NTB	1. Memonitoring dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja 2. Menindaklanjuti hasil pemantauan

No.	Program/ Area Pengungkit	Indikator	Target	Kegiatan
				3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi (notulen rapat)
		Perubahan dan pola pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen pola pikir dan budaya kerja aparatur di BPSIP NTB	1. Menjadikan pimpinan sebagai Role Model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas 2. Menunjuk beberapa pejabat fungsional sebagai Role Model 3. Menetapkan agen perubahan 4. Melakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir 5. Melibatkan semua ASN BPSIP NTB dalam Pembangunan Zona Integritas
2.	Penataan Tatalaksana	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugasdi BPSIP NTB	1. Membuat SOP yang mengacu pada proses standardisasi di BPSIP NTB 2. Menerapkan SOP secara konsisten
		E-office	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen dan meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	1. Menggunakan SSIP dalam pengukuran kinerja 2. Menjalankan aplikasi untuk memudahkan aparatur dalam pelaksanaan tugas 3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan stekholder dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari BPSIP NTB 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
		Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari BPSIP NTB	1. Membuat kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik, berupa Surat Keputusan Kepala BPSIP NTB 2. Membuat brosur, audio visual, banner, website dan email dalam memberikan informasi kepada publik
3.	Penataan Sistem	Perencanaan kebutuhan	Meningkatnya efektivitas	1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di

No.	Program/ Area Pengungkit	Indikator	Target	Kegiatan
	Manajemen SDM	pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	manajemen SDM aparatur BPSIP NTB	BPSIP NTB dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan 2. Membuat analisis beban kerja pegawai di BPSIP NTB 3. Memonitoring dan mengevaluasi penempatan pegawai dan honorer
		Pola mutasi internal	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur BPSIP NTB	1. Membuat mutasi internal di BPSIP NTB 2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal dengan kewenangan Kepala BPSIP NTB 3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola mutasi internal
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Meningkatnya profesionalitas manajemen SDM aparatur BPSIP NTB	1. Menyusun training need analysis untuk pengembangan kompetensi 2. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pengembangan kompetensi
		Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur BPSIP NTB	Melakukan pengukuran Kinerja Individu secara periodik
		Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Meningkatnya disiplin SDM pada aparatur BPSIP NTB	Melaksanakan aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku dengan baik
		Sistem informasi kepegawaian	Meningkatnya transparansi dan keakuratan pada aparatur BPSIP NTB	Memutakhirkan data secara berkala pada SIKEP BPSIP NTB
4.	Penguatan akuntabilitas	Keterlibatan pimpinan	Terwujudnya efektivitas pimpinan dalam pimpinan dalam penyusunan perencanaan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya penyusunan laporan kinerja yang tepat waktu	1. Menyusun dokumen perencanaan 2. Terdapatnya indikator kinerja utama 3. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

No.	Program/ Area Pengungkit	Indikator	Target	Kegiatan
5.	Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi	Meminimalisir adanya indikasi suap didalam ruang kerja aparatur BPSIP NTB	Pembentukan tim pengendali gratifikasi dan membuat akses masuk dalam area kerja menggunakan aplikasi pelaporan UPG
		Penerapan SPIP	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di BPSIP NTB
		Pengaduan masyarakat	Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada BPSIP NTB	Laporan pengaduan yang menampilkan laporan pengaduan via website
		Whistle blowing system	Meningkatnya kualitas dan efektivitas terhadap pelaksanaan penyelesaian tugas aparatur di BPSIP NTB	Terdapatnya penerapan aplikasi SIWAS yang mempermudah penggunaan peradilan dalam mmelaporkan ASN jika terdapat indikasi penyelewengan dari tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan
		Penanganan benturan kepentingan	Meningkatnya efektivitas tugas dan fungsi aparatur pada BPSIP NTB	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan
6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Standar pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan yang terintegrasi di BPSIP NTB	Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di BPSIP NTB
		Budaya pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau di BPSIP NTB	1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan budaya pelayanan prima di BPSIP NTB 2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media
		Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BPSIP NTB 2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan

No.	Program/ Area Pungungkit	Indikator	Target	Kegiatan
				masyarakat yang dapatt diakses secara terbuka
				3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BPSIP NTB

3.2. Permasalahan

Pada Triwulan I tahun 2024 masih terdapat kendala pada anggaran yaitu blokir anggaran sehingga belum semua kegiatan bisa dilaksanakan. Dari pagu senilai Rp. 14,643,232,000,-. Terdapat pagu blokir sejumlah Rp. 1.241.239.000,-. Pagu blokir ada pada kegiatan teknis dan manajemen sehingga menyebabkan belum terlaksana sepenuhnya kegiatan untuk mencapai target Perjanjian Kinerja (PK) Balai.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP NTB Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	20,5
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat (Nilai)	90

Untuk mencapai Sasaran PK pada poin 1 dan 2, anggaran yang tersedia dalam Pagu DIPA BPSIP NTB saat ini masih dalam status Blokir sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan dan dapat menghambat tercapainya target yang telah disusun.

3.3. Saran dan Perbaikan

Saat ini, kegiatan teknis difokuskan pada kegiatan yang tidak terblokir yaitu pada kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 serta Pinjaman Luar Negeri ICARE.

3.4. Tindak Lanjut Hasil Monev

Dari hasil temuan yang telah disampaikan dapat dilakukan/diambil langkah tindak lanjut yakni dengan terus melakukan koordinasi dengan BB Penerapan terkait upaya buka blokir.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian NTB Triwulan I 2024 mencerminkan kinerja Balai BSIP NTB sebagai perwujudan dari komitmen seluruh jajaran pegawai dalam upaya melaksanakan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Laporan ini berguna untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menyiasati berbagai permasalahan dan kendala dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan di BSIP NTB guna tercapainya reformasi birokrasi yang lebih baik.

Semoga laporan Triwulan I tahun 2024 di Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian NTB dapat dijadikan cerminan hasil kegiatan dan menjadi acuan dalam perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya.